**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

Tim Penyusun, *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik*, Pelita Raya Selaras, Jakarta, 2010.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Iman Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku I, PT Alumni, 2000.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum*, Buku ke-3, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Saragih Alamsyah Ahmad, *Kata Pengantar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat, Jakarat, 2010.

Nofianti Leny, *Ringkasan Buku Public Sector Governance pada Pemerintahan Daerah*, Publik Sector Governance, Pekanbaru, 2015.

Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021.

Wajdi Farid, *Hukum dan Kebijakan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,kencana, Jakarta, 2008.

Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

1. **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komunikasi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komunikasi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standra Layanan Informasi Publik.

Peraturan Bupati Garut Nomor 385 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Keputusan Bupati Garut Nomor 042/Kep.366-Diskominfo/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Inspektorat Kabupaten Garut Nomor 555/1864 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan serta telah ditetapkan berdasarkan.

1. **Sumber lain**

Nunuk Febriananingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, terbit 1 April 2012, <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/artikel>, diunduh pada tanggal 29 November 2022.

Syarif Budiman, *Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik, Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, terbit 9 Mei 2017, <https://ejournal.balitbangham.go.id>, diunduh pada tanggal 29 November 2022.

Admin PPID, *Pengertian Keterbukaan Informasi Publik Menurut Para Ahli*, PPID Kabupaten Garut, terbit 9 Juni 2023, <https://ppid.garutkab.go.id/informasi_publik>, diunduh pada tanggal 26 Juni 2023.

Syamsudin, *Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Komisi Informasi Publik Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Volume 8 terbit 1 Maret 2021, hlm. 108, <https://www.researchgate.net/publication/370941215>, di unduh pada tanggal 5 September 2023.

Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan volume 1, 3 November 2012, hlm 343, <https://jurnalhukumdanperadilan.org>, diunduh tanggal 3 Oktober 2023.